



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Media massa telah begitu erat dengan masyarakat. Keduanya merupakan elemen yang saling membutuhkan. Dalam menjalankan kewajibannya sebagai pembawa berita, media memiliki 4 fungsi umum, yakni yang pertama adalah fungsi edukasi. Artinya media memberikan pendidikan pada masyarakat sehingga media dapat berperan sebagai pendidik masyarakat. Yang kedua adalah fungsi informasi, artinya, media memberi dan menyediakan informasi tentang peristiwa yang terjadi pada masyarakat. Yang ketiga adalah fungsi hiburan, artinya media menyajikan hiburan bagi masyarakat. Dan yang keempat adalah fungsi pengaruh, artinya media memberikan pengaruh pada masyarakat melalui berita yang disajikan (Dahlan, 2008:461).

Media sebagai wadah informasi bagi masyarakat selayaknya mengutamakan objektivitas penulisan berita agar berita yang beredar tidak menyesatkan masyarakat. Objektivitas dalam jurnalisme atau pers adalah prinsip yang signifikan. Objektivitas jurnalistik seringkali merujuk pada keadilan, netralitas, faktualitas, dan nonpartisan. Westerstahl (dalam McQuail, 2000:173), pernah menyatakan bahwa yang dinamakan objektif setidaknya mengandung faktualitas dan imparzialità. Faktualitas berarti kebenaran yang di dalamnya

memuat akurasi (tepat dan cermat), sedangkan imparcialitas mensyaratkan adanya keseimbangan (*balance*) dan kenetralan dalam mengungkap sesuatu.

Jadi dalam menulis berita, seorang wartawan harus bisa menjaga jarak dengan peristiwa yang diangkatnya sebagai berita, wartawan dilarang melibatkan kepentingan pribadi dan pandangan subyektif atas suatu peristiwa. Tulisan berita harus faktual atau dituliskan berdasarkan fakta dan data yang benar-benar ditemukan di lapangan. Selain itu, penulisan juga harus *cover both side*, yakni tulisan yang seimbang dan berusaha mencantumkan semua pihak yang terlibat dalam peristiwa.

Menurut Kovach dan Rosenstiel dalam bukunya *Sembilan Elemen jurnalisme* (2004:471), objektivitas meminta wartawan mengembangkan sebuah metode untuk secara konsisten menguji informasi dengan tepat sehingga bias personal dan bias budaya tidak melemahkan akurasi kerja mereka. Artinya jurnalisme membutuhkan adanya suatu kesamaan metode dan suatu kesamaan wilayah untuk fakta yang valid. Jadi pada akhirnya metodenyalah yang objektif, bukan si wartawan tersebut. Sehingga untuk menghasilkan berita yang objektif, kuncinya adalah disiplin dalam metodenya.

Menurut Rofiuddin dalam tesisnya di Universitas Diponegoro, Semarang yang berjudul *Menelusuri Praktik Pemberian Amplop Kepada Wartawan di Semarang* (2011:14), posisi wartawan dan media massa ini sangat strategis dalam mempengaruhi pola pikir masyarakat. Posisi yang strategis ini dipandang sebagai sesuatu yang penting bagi narasumber. Sehingga para narasumber selalu berusaha untuk dekat dengan wartawan. Salah satu cara yang sering digunakan untuk dekat

dengan wartawan adalah menggunakan amplop. Bahkan mereka secara khusus mengalokasikan dana untuk amplop wartawan. Tujuan dari pemberian amplop ini agar narasumber dapat memanfaatkan kedekatan mereka terhadap isi pemberitaan yang dibuat wartawan, yakni agar kegiatan mereka diberitakan atau tidak memberitakan keburukannya .

Wartawan yang sering kali menerima amplop atau suap dari para narasumber biasa dikenal dengan sebutan wartawan amplop. Yang termasuk wartawan amplop di sini adalah para wartawan yang bekerja di sebuah media yang menerima bahkan mencari uang dari narasumber. Ada pula istilah wartawan bodrek, yakni mereka yang tidak bekerja di media tetapi mengaku sebagai wartawan dan sering memaksa narasumber untuk memberi uang.

Kasus amplop ini merupakan fenomena besar di Indonesia. Survei yang dilakukan Aliansi Jurnalis Independen dalam *Potret Jurnalis Indonesia; Survey AJI Tahun 2005 tentang Media dan Jurnalis Indonesia di 17 Kota* (2006:84), di Indonesia pada tahun 2005 menemukan kesempatan wartawan untuk mendapatkan amplop sangatlah besar. Sebanyak 61,5 persen wartawan pernah ditawari amplop oleh narasumber. Hanya 37,3 persen responden wartawan mengatakan tidak pernah punya pengalaman mendapatkan penawaran uang dari narasumber. Data ini menunjukkan, wartawan Indonesia selalu berketat pada penerimaan amplop. Begitu juga dengan narasumbernya yang tergolong suka memberi amplop kepada wartawan.

Banyak penyebab kenapa wartawan masih menerima amplop. Pemberantasan praktik wartawan amplop begitu sulit dilaksanakan karena

pandangan wartawan yang keliru mengenai amplop. Dalam buku *Jurnalisme Anti Korupsi: Panduan untuk Jurnalis* yang dikutip Rofiuddin (2011:9), disebutkan bahwa kalangan wartawan masih terpecah dalam persoalan amplop. Sebagian wartawan melihat hal itu bukan sebagai korupsi sehingga layak untuk diterima dan sebagian lainnya melihat hal itu sebagai suap. Wartawan kerap menerima amplop karena merasa yakin bahwa perbuatannya tidak mempengaruhi independensi tugasnya. Mereka beranggapan bahwa narasumber yang memberikan amplop merupakan tindakan tulus.

Alasan lain yang banyak diungkapkan wartawan adalah pemberian amplop diterima untuk menjaga hubungan baik dengan narasumber. Kalau wartawan menolak, dikhawatirkan akan membuat hubungan menjadi renggang dengan narasumber. Dalam *Jurnalisme Anti Korupsi: Panduan untuk Jurnalis* seperti dikutip Rofiuddin (2011:9), menolak pemberian amplop dikhawatirkan bisa menyinggung jika seseorang memberikan sesuatu tapi ditolak.

Minimnya gaji wartawan juga digadang-gadang menjadi pemicu para wartawan menerima amplop. Pada artikel *AJI: Upah Layak Wartawan Pemula Rp 5,7 Juta* yang dipublikasikan oleh www.tempo.co dan diakses pada 20 Februari 2015, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta menetapkan standar upah layak untuk jurnalis pemula di Jakarta pada tahun 2014 sebesar Rp 5,7 juta per bulan. Ketua Aji Umar Idris mengatakan angka upah layak itu berdasarkan 39 komponen yang menyangkut kebutuhan hidup layak bagi seorang jurnalis pemula di Jakarta. Umar Idris juga menambahkan bahwa rata-rata upah jurnalis di Jakarta saat ini masih jauh di bawah standar upah layak. Dari 55 media di Jakarta yang di survey,

sebagian besar menggaji jurnalis yang baru sekitar Rp 3 juta per bulan. Bahkan ada dua media *online* yang menggaji jurnalisnya Rp 1,8 juta dan Rp 1,7 juta per bulan, dibawah Upah Minimum Provinsi DKI yang besarnya Rp 2,7 juta.

Sedangkan pada www.portalkbr.com pada artikel *AJI Jakarta: Media di Indonesia Pelit Gaji Wartawannya* yang diakses pada 25 Oktober 2014, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Umar Idris mengatakan, perusahaan pers di Indonesia enggan mengeluarkan lebih dari 15% pengeluaran untuk mengupah jurnalisnya. Padahal, perusahaan media di negara-negara tetangga mengeluarkan lebih 15% untuk menggaji para jurnalis. "Pengeluaran mereka untuk gaji wartawan itu sangat kecil, misalnya di Jawa Pos, dari blognya pak Dahlan Iskan (pemilik Jawa Pos Group, red dan Menteri BUMN) hanya 8% dari total pengeluaran perusahaan. Di media lain hanya 10-12% dari total pengeluaran perusahaan. Sangat kecil memang dibandingkan dengan Malaysia yang 18%, Singapura 29% dan Australia bahkan sampai 34%." Bisa dilihat dari data di atas bahwa dibanding wartawan di negara-negara sekitar, negara sangat tertinggal jauh.

Sumber lain yang didapat dari www.republika.co.id pada artikel *Upah Jurnalis Dinilai Minim* yang diakses pada 23 Oktober 2014, AJI Jakarta juga memandang tingkat upah layak ini sangat penting agar jurnalis lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. Rendahnya upah dan kesejahteraan jurnalis membuat profesi ini akan selalu rentan terhadap godaan suap/amplop dalam bentuk apapun. "Kondisi ini sangat berbahaya bagi kebebasan pers karena pers dapat dikendalikan oleh kepentingan narasumber, tidak lagi mengabdikan kepada

kepentingan publik.” Maraknya kasus suap di kalangan wartawan ini menimbulkan keprihatinan bagi beberapa kelompok wartawan. Anggota Dewan Pers Nezar Patria dalam diskusi tentang praktek amplop wartawan di Universitas Stikubank Semarang, Desember 2013, mengungkapkan bahwa dampak pemberian amplop itu bisa membuat wartawan berbohong dan membunuh fungsi media sebagai penyaji informasi.

Fenomena ini sangat menarik untuk diteliti karena tindakan ini secara terang-terangan telah melanggar Kode Etik Jurnalistik pasal 6 yang berbunyi “Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.”

Pada www.bbcindonesia.com terdapat artikel *Pos Anggaran Wartawan Dikritik* yang membahas tentang kampanye Aliansi Jurnalis Independen (AJI) “Tolak Suap, Bangun Indonesia Bersih” yang diluncurkan pada 22 Juli 2006 di Jakarta. Media masa juga turut berpartisipasi aktif dalam kampanye yang bertujuan untuk memerangi budaya suap guna membangun Indonesia yang bersih.

Dalam kasus ini, penulis memilih objek yang diteliti adalah wartawan yang bekerja pada media online. Media online dipilih karena saat ini media online merupakan media yang paling dekat dengan masyarakat dan dapat menyebarkan informasi dengan begitu cepat. Dengan kecepatannya dalam menyebarkan berita, penulis merasa bahwa kelebihan media online ini dapat menjadi suatu daya tarik bagi narasumber sehingga berita yang mereka inginkan dapat tersebar dengan cepat dan dikonsumsi oleh masyarakat luas.

Melalui teknologi, media online semakin berkembang dengan cepat dan kemudian menjadi salah satu media yang unggul dalam berkomunikasi. Wartawan

media online jelas dituntut untuk bekerja dengan cepat. Umumnya, tugas wartawan online dengan media lainnya kurang lebih sama saja. Akan tetapi, pada beberapa media online, mereka membebaskan wartawannya untuk mengolah sendiri tulisannya. Jadi wartawan meliput, menulis, serta mempublikasikan berita sendiri tanpa melalui editor. Hal ini banyak dilakukan karena media online menuntut kecepatan berita. Inilah yang membedakan wartawan online dengan wartawan cetak, yang mana media cetak memiliki alur yang lebih jelas dan terstruktur sebelum naik cetak.

Kebebasan yang diberikan oleh media online inilah yang kemudian menarik perhatian peneliti. Karena apabila wartawan dapat mempublikasikan tulisannya sendiri tanpa melewati editor, tentu pembuatan berita yang tidak objektif lebih mudah dilakukan. Sehingga narasumber yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu dapat lebih mudah untuk mendekati wartawan online, ditambah lagi dengan kecepatan penyebaran berita yang begitu cepat.

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan membagikan kuesioner sebagai instrument pengumpulan data. Responden dalam penelitian ini adalah wartawan media online yang pernah menerima amplop.

Berkaitan dengan keseluruhan fenomena ini, penulis tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul: **“Pola Pemberian Amplop dan Sikap Wartawan Media Online.”**

1.2 Rumusan masalah

1. Bagaimana pola pemberian amplop yang diterima wartawan media *online*?
2. Bagaimana sikap wartawan media *online* terhadap pemberian amplop?

1.3 Tujuan masalah

1. Untuk menjelaskan bagaimana pola pemberian amplop yang diterima wartawan media *online*.
2. Untuk menjelaskan bagaimana sikap wartawan media *online* terhadap pemberian amplop.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan membantu semua pihak untuk lebih memahami suatu konsep atau teori Ilmu Komunikasi, khususnya teori pertukaran sosial dan teori gift yang tercermin dalam kajian fenomena amplop di kalangan wartawan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pengamatan atas pengaruh amplop di kalangan wartawan terhadap objektivitas penulisan berita dan membantu memetakan sejauh mana pengaruh amplop mempengaruhi objektivitas penulisan berita.





UMN